

Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Sinta Suleman^{1*}, Roys Pakaya²

¹Program Studi Sistem Informasi, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo 96138, Indonesia

²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo 96138, Indonesia

Email: ^{1*}sintasuleman@unisan.ac.id, ²royspakaya@unisan.ac.id

Correspondent: sintasuleman@unisan.ac.id

Submitted: 05-01-2024; Accepted: 19-01-2024; Published: 22-01-2024

ABSTRACT

Abstract– The Regional Government Implementation Reporting Application within the Gorontalo City Government is an information system designed to increase efficiency, transparency and accountability in the implementation of regional government duties and responsibilities. This application aims to simplify the reporting process for regional government administration, facilitate access to information for the public, and strengthen internal monitoring mechanisms. By utilizing information technology, this application provides a platform that allows government administrators in Gorontalo City to report their activities, projects and performance achievements in a structured manner. The collected data can be accessed by related parties, including the general public, through a user-friendly interface. This provides opportunities for active community participation in monitoring and evaluating local government performance. This application is also equipped with adequate security features to protect sensitive data and maintain information integrity. Additionally, strong authentication mechanisms are implemented to ensure that incoming reports come from legitimate sources. The sustainability and development of this application is guaranteed through ongoing maintenance and adjustment in accordance with the needs and changes in the local government environment. By implementing the Regional Government Administration Reporting Application, it is hoped that it can create a system that is responsive, transparent and responsible, so that it can have a positive impact on the quality of public services and development in Gorontalo City.

Keywords: Application; Reporting; Administration; Government; Gorontalo City;

ABSTRAK

Abstrak– Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, aplikasi ini menyediakan platform yang memungkinkan para penyelenggara pemerintahan di Kota Gorontalo untuk melaporkan kegiatan, proyek, dan capaian kinerja mereka secara terstruktur. Data yang terkumpul dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk masyarakat umum, melalui antarmuka yang user-friendly. Hal ini memberikan peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas informasi. Selain itu, mekanisme otentikasi yang kuat diterapkan untuk memastikan bahwa laporan yang masuk berasal dari sumber yang sah. Keberlanjutan dan pengembangan aplikasi ini dijamin melalui pemeliharaan serta penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan pemerintahan daerah. Dengan implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menciptakan sistem yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Aplikasi; Pelaporan; Penyelenggaraan; Pemerintahan; Kota Gorontalo;

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang optimal. Kota Gorontalo sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah di Indonesia memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan cepat dalam lingkup pelayanan publik dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat mendorong perlunya inovasi dalam sistem pelaporan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menjadi suatu kebutuhan mendesak [1].

Dengan menerapkan aplikasi ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam proses pelaporan dan pengumpulan data kinerja pemerintahan daerah. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam menyajikan informasi mengenai kegiatan, proyek, dan capaian kinerja pemerintahan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memotivasi partisipasi mereka dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah [2].

Selain itu, implementasi Aplikasi Pelaporan ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan data secara efektif dan efisien, meminimalkan potensi kesalahan manusiawi, dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan pemerintah daerah berdasarkan data yang akurat dan real-time. Dengan demikian, Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat menjadi landasan untuk transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal [3].

Implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional
Mengoptimalkan proses pelaporan kinerja pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data.
2. Mendorong Transparansi
Membangun mekanisme yang memungkinkan akses terbuka terhadap informasi kinerja pemerintahan daerah, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan
Menyediakan platform yang memudahkan penyelenggara pemerintahan dalam mengakses dan menganalisis data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, menguatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
5. Menyediakan Informasi Real-Time
Memastikan ketersediaan data kinerja pemerintahan daerah secara real-time untuk mendukung keputusan cepat dan responsif.
6. Optimalisasi Pelaporan Kinerja
Menciptakan sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk memperoleh data kinerja pemerintahan daerah secara akurat dan tepat waktu.
7. Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan tingkat transparansi dalam penyajian informasi kinerja pemerintahan daerah kepada masyarakat, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.
8. Peningkatan Pengawasan Internal
Membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat, memungkinkan pemerintah daerah untuk secara proaktif mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka sendiri.
9. Pemberdayaan Masyarakat
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, menciptakan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
10. Efisiensi Pengelolaan Data
Mengurangi potensi kesalahan manusiawi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kinerja pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui implementasi Aplikasi Pelaporan ini, diharapkan Kota Gorontalo dapat memperkuat fondasi pemerintahan yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal [4].

2. METODOLOGI

Metodologi Penelitian Implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Persiapan
 - a. Analisis Kebutuhan

- Menganalisis kebutuhan *stakeholder* terkait, termasuk pemerintah daerah, petugas pelaporan, dan masyarakat.
 - b. Persiapan Rencana
 - Menyusun rencana implementasi yang mencakup sumber daya, jadwal, dan langkah-langkah teknis [5].
2. Pengembangan Aplikasi
 - a. Desain Aplikasi
 - Membuat desain sistem Aplikasi Pelaporan berdasarkan analisis kebutuhan.
 - b. Pengembangan
 - Menerapkan aplikasi dengan menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai.
 - c. Uji Fungsionalitas
 - Melakukan uji fungsionalitas aplikasi untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai rencana.
3. Pelibatan *Stakeholder*
 - a. Pelatihan
 - Melakukan pelatihan kepada pengguna, termasuk petugas pelaporan dan pihak terkait, untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan aplikasi.
 - b. Konsultasi dan Umpan Balik
 - Mengadakan sesi konsultasi dan memperoleh umpan balik dari *stakeholder* untuk meningkatkan aplikasi seiring waktu.
4. Implementasi Pilot
 - a. Pemilihan Wilayah Uji Coba
 - Memilih wilayah atau unit pemerintahan sebagai pilot untuk menguji aplikasi sebelum implementasi secara menyeluruh.
 - b. Evaluasi Pilot
 - Mengevaluasi kinerja dan respons aplikasi pada tahap pilot, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
5. Implementasi Penuh
 - a. Penyebaran
 - Melakukan penyebaran Aplikasi Pelaporan ke seluruh lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - Memantau kinerja aplikasi secara berkala dan melakukan evaluasi untuk memastikan pemenuhan tujuan implementasi [6].
6. Analisis Data dan Hasil
 - a. Pengumpulan Data
 - Mengumpulkan data pelaporan pemerintahan daerah melalui aplikasi.
 - b. Analisis Data
 - Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi dampak aplikasi terhadap efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
7. Evaluasi Efektivitas
 - a. Kuesioner dan Wawancara
 - Melakukan kuesioner dan wawancara untuk menilai persepsi dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi.
 - b. Analisis Efektivitas
 - Menganalisis hasil evaluasi untuk menilai sejauh mana aplikasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Dokumentasi dan Publikasi:**
 - a. Penyusunan Laporan
 - Menyusun laporan penelitian yang mencakup metodologi, temuan, dan rekomendasi.
 - b. Publikasi
 - Membagikan hasil penelitian kepada pihak terkait dan masyarakat melalui publikasi *online*, seminar, atau lokakarya [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

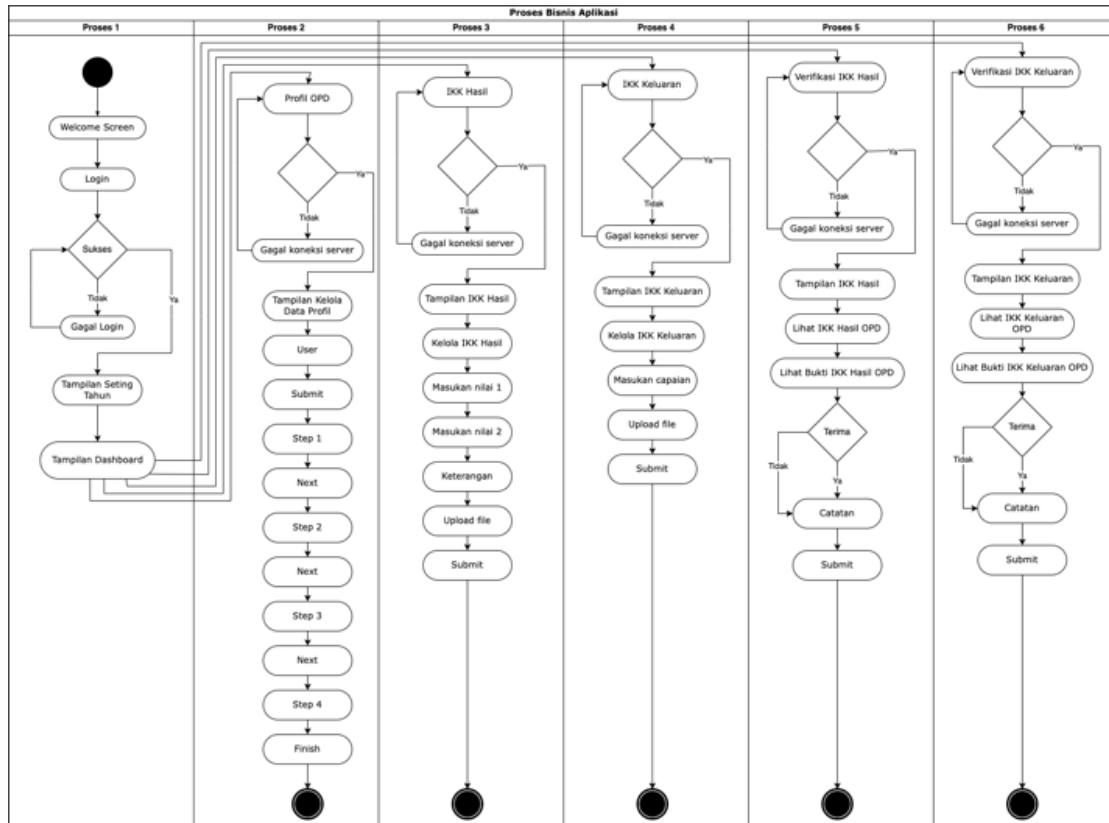
1. Proses Bisnis Aplikasi

Proses bisnis aplikasi merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan suatu aplikasi atau sistem perangkat lunak. Proses bisnis ini melibatkan sejumlah tahapan yang diperlukan untuk mengelola data, informasi, atau tugas tertentu dengan cara yang terorganisir dan efisien. Tujuan utama dari proses bisnis aplikasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan keberlanjutan operasional melalui pemanfaatan teknologi informasi [8].

Pada Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terdapat 5 pilihan menu yaitu:

1. Menu profil
2. Menu IKK Hasil,
3. Menu IKK Keluaran.
4. Menu Verifikasi IKK Hasil,
5. Menu Verifikasi IKK Keluaran.

Setiap menu memiliki prosesnya masing-masing seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

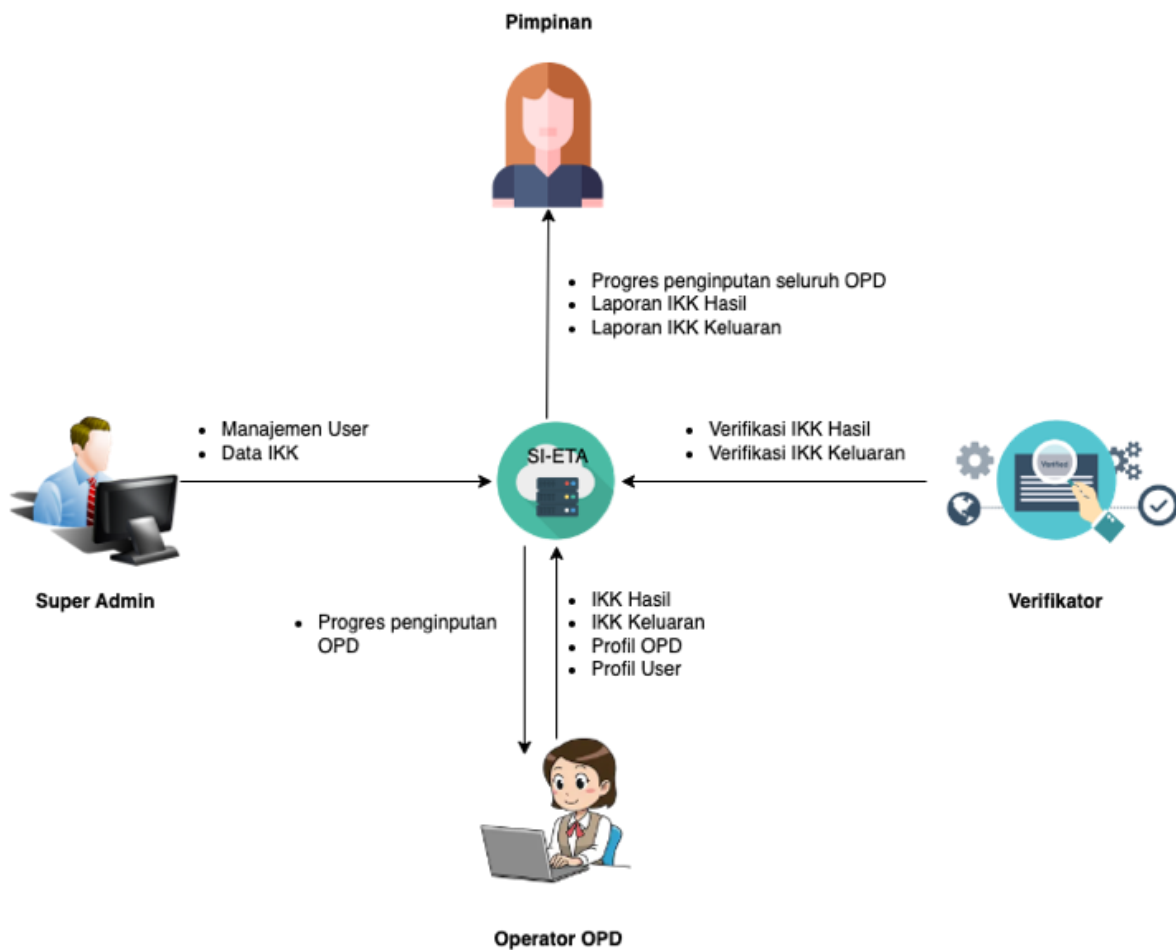


Gambar 1. Proses Bisnis Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Proses Bisnis Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo meliputi:

1. Registrasi Pengguna
 - a. Pendaftaran Akun
Penyelenggara pemerintahan dan pihak terkait mendaftarkan akun mereka di aplikasi.
 - b. Otentikasi Identitas
Verifikasi identitas pengguna melalui proses otentikasi yang aman.
2. Input Data Kinerja
 - a. Pengisian Laporan
Penyelenggara pemerintahan mengisi laporan kegiatan dan proyek melalui formulir yang telah disediakan.
 - b. Pengunggahan Dokumen
Melampirkan dokumen pendukung seperti foto, surat keputusan, atau data lainnya.
3. Validasi Data
 - a. Pemeriksaan Konsistensi
Sistem melakukan pemeriksaan otomatis terhadap konsistensi data yang diinput.
 - b. Verifikasi Oleh Petugas
Petugas pemerintah melakukan verifikasi manual terhadap laporan dan dokumen yang diunggah.
4. Pengawasan Internal
 - a. Proses Verifikasi
Tim internal melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja berdasarkan laporan yang diajukan.
 - b. Pengelolaan Penyimpangan
Mengidentifikasi dan menanggapi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar kinerja yang ditetapkan.
5. Penyimpanan Data
 - a. Penyimpanan Aman
Data kinerja yang telah diverifikasi disimpan secara aman dan terenkripsi dalam database aplikasi.
 - b. Manajemen Arsip
Melakukan manajemen arsip digital untuk memudahkan pencarian dan audit.
6. Publikasi Informasi
 - a. Penyajian Data Publik
Data kinerja yang telah diverifikasi dipublikasikan melalui antarmuka yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - b. Pemberitahuan Publik

- Memberikan notifikasi kepada masyarakat terkait adanya laporan baru atau informasi penting lainnya.
7. Pemantauan oleh Masyarakat
 - a. Akses Masyarakat
Masyarakat dapat mengakses data kinerja pemerintah daerah dan memberikan tanggapan atau komentar.
 - b. Pemantauan Partisipatif
Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara partisipatif.
 8. Evaluasi dan Peningkatan
 - a. Analisis Kinerja
Melakukan evaluasi kinerja aplikasi dan dampaknya terhadap proses pelaporan.
 - b. Pembaruan Sistem
Melakukan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi.
 9. Pelatihan dan Dukungan
 - a. Pelatihan Reguler
Menyelenggarakan pelatihan reguler untuk pengguna aplikasi.
 - b. Dukungan Teknis
Menyediakan layanan dukungan teknis untuk menanggapi pertanyaan atau masalah pengguna.
 10. Audit dan Keamanan
 - a. Audit Internal
Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi.
 - b. Penanganan Keamanan
Menanggapi potensi ancaman keamanan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
2. Gambaran Umum Sistem
- Sistem adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi [9].



Gambar 2. Gambaran Aplikasi

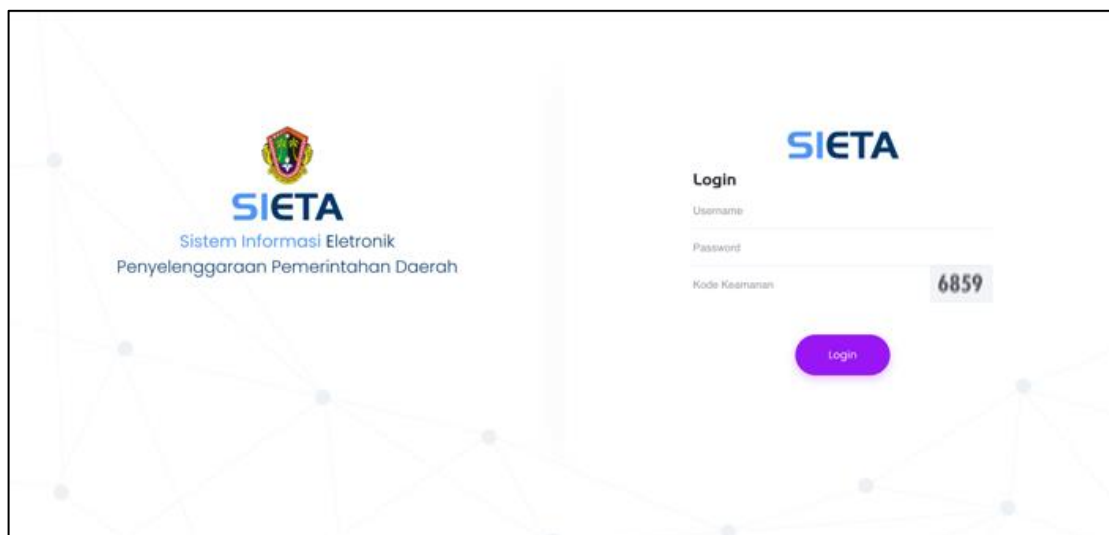
Aplikasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari 4 *role* (hak akses aplikasi) yaitu

1. Pimpinan
Role pimpinan memiliki akses:
 - a. Melihat progres penginputan IKK pada setiap OPD
 - b. Melihat laporan IKK Hasil dan IKK Keluaran
2. Super Admin
Role super admin memiliki akses:
 - a. Manajemen User untuk setiap OPD
 - b. Manajemen Data IKK
3. Verifikator
Role verifikator memiliki akses untuk melakukan Verifikasi IKK Hasil dan IKK Keluaran
4. Operator OPD
Role Operator OPD memiliki akses:
 - a. Menginput IKK Hasil, IKK Keluaran, Profil OPD, dan Profil User
 - b. Melihat progres penginputan IKK pada OPD nya

3. Implementasi Sistem

Implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo adalah proses penerapan dan penggunaan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi pelaporan, pengumpulan, dan analisis data terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, khususnya di Kota Gorontalo. Tujuan utama implementasi aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelaporan pemerintah daerah, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah setempat. Implementasi Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan dan pengembangan aplikasi hingga pelibatan pengguna dan evaluasi dampaknya. Selain itu, implementasi ini melibatkan pemastian keamanan data, pelatihan pengguna, dan integrasi dengan sistem pemerintahan yang ada. Dengan adanya implementasi aplikasi ini, diharapkan dapat terjadi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif, efektif, dan terbuka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi kinerja pemerintahan daerah [10]. Dibawah ini merupakan implemantasi *Grafik User Interface (GUI)* dari Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

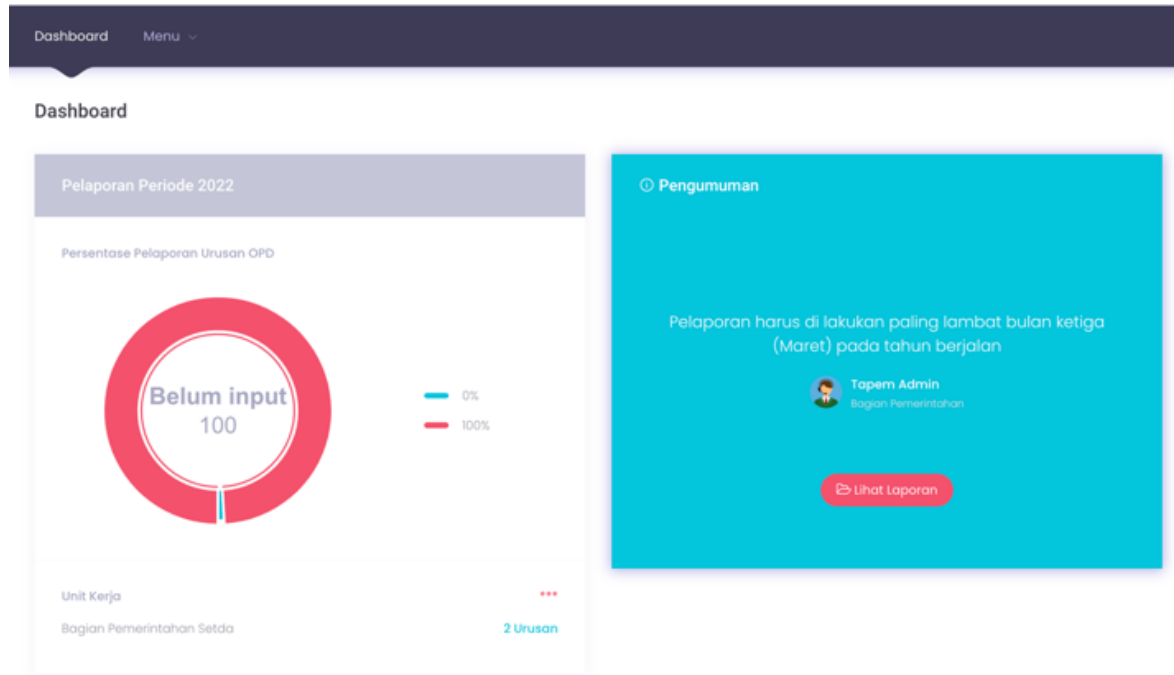
1. Login



Gambar 3. Halaman *Login*

Sebelum pengguna dapat menggunakan seluruh fitur dari aplikasi, pengguna diharuskan melakukan autentikasi menggunakan username dan password terlebih dahulu. *Form login* digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang ingin mengakses aplikasi.

2. Dashboard



Gambar 4. Halaman *Dashboard*

Setelah berhasil *login*, muncul halaman *Dasboard* seperti gambar di bawah ini. Untuk melihat Status pengisian, bisa di lihat di bagian atas halaman, dan pilih menu “*Dashoard*”. Halaman dashboard dalam sebuah aplikasi memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk memberikan pengguna pandangan menyeluruh tentang informasi dan fungsionalitas utama

3. Profil OPD

Profil OPD seperti gambar di bawah, pengguna dapat melihat kolom-kolom kosong yang terbagi dalam 5 tahapan yaitu *user*, *step 1*, *step 2*, *step 3*, dan *step 4* yang berisi informasi OPD.

Gambar 5. Profil OPD

4. *Tab User*

Pada tab *User* terdapat “Data User”, untuk merubah kata sandi yang lama dengan kata sandi yang baru

Gambar 6. *Tab User*

5. *Tab Step 1*

Didalam *Tab Step 1* terdapat “Data Utama Instansi”, untuk pengisian data instansi dan isi dengan sesuai.

Gambar 7. *Tab Step 1*

6. *Tab Step 2*

Pada *Tab Step 2* terdapat “Data Keuangan OPD”, untuk pengisian data keuangan dan isi dengan sesuai.

Kelola Data Profil User Step 1 **Step 2** Step 3 Step 4 Refresh

2. Data Keuangan Daerah

Total APBD (Rp) *Gunakan titik (.) sebagai penanda desimal

Realisasi APBD (Rp) *Gunakan titik (.) sebagai penanda desimal

Indeks Kemampuan Fiskal Daerah

Kategori Kemampuan Fiskal Daerah Sangat Rendah ▼

Next Cancel

Gambar 8. Tab Step 2

7. Tab Step 3

Pada Tab Step 3 terdapat “Jabatan Terisi”, untuk pengisian data jabatan dan isi dengan sesuai.

Kelola Data Profil User Step 1 Step 2 **Step 3** Step 4 Refresh

3. Jabatan Terisi

Jumlah Eselon II

Jumlah Eselon III

Jumlah Eselon IV

Jumlah JFT Ahli Madya (Koordinator)

Jumlah JFT Ahli Madya (Sub Koordinator)

Jumlah JFU

Jumlah Tenaga Kontrak

Jumlah Keseluruhan Jabatan Terisi

4. Jabatan Kosong

Jumlah Eselon II

Jumlah Eselon III

Jumlah Eselon IV

Jumlah Keseluruhan Jabatan Kosong

Next Cancel

Gambar 9. Tab Step 3

8. *Tab Step 4*
Pada *Tab Step 4* terdapat “Data Urusan”, untuk pengisian data urusan dan isi dengan sesuai.

The screenshot shows the 'Step 4' tab in the 'Kelola Data Profil' application. The left sidebar displays the user profile for 'Bagian Pemerintahan Setda' with a 'email belum diisi' status. The main content area is titled '5. Data Urusan' and contains a list of administrative services grouped into seven categories (Rumpun 1-7) and a 'Rumpun Fungsi Penunjang' section. Each category contains several checkboxes for selection. The 'Rumpun 1' section has 'Sosial' checked. The 'Rumpun 7' section has 'Pemberdayaan masyarakat dan desa' checked. At the bottom, there are 'Finish' and 'Cancel' buttons.

Gambar 10. *Tab Step 4*

9. **IKK Hasil**
Pemilihan IKK hasil harus sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Penggunaan IKK hasil yang tepat dapat membantu dalam evaluasi kinerja pemerintahan, memotivasi perbaikan, dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai pencapaian dan upaya pemerintah Kota Gorontalo.

Data 2022							Refresh
<div> <i>i</i> Tekan Ctrl+F1 Untuk mencari data, Tekan Esc! Untuk keluar dari pencarian </div>							
No IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	File	
I. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
- Sosial							
1.f.1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki Jumlah data penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk Jumlah penyandang disabilitas terlarang, 	Persentase (%) penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang dan gelandangan 		belum di		

Gambar 11. IKK Hasil

Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Gorontalo dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada prioritas, tujuan, dan kebijakan pemerintah setempat. Berikut adalah beberapa IKK hasil yang dapat digunakan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo:

- Tingkat Transparansi Pemerintah
- Angka Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Lokal
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- Keberlanjutan Lingkungan
- Partisipasi Masyarakat
- Tingkat Kepatuhan Pemerintah terhadap Standar dan Regulasi
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

10. IKK Keluaran

Pemilihan IKK keluaran harus mencerminkan prioritas dan tujuan pembangunan pemerintah daerah. Dengan memantau dan melaporkan IKK keluaran, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kegiatan dan mengukur kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Gorontalo.

Data 2022

Refresh

Tekan Ctrl+F1 Untuk mencari data, Tekan Esc! Untuk keluar dari pencarian

No IKK	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Diperbarui	Keterangan	File	Verifikasi Admin	Aksi
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
- Sosial								
1	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	belum di input					
2	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	belum di input					
3	1.f.1	JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk	belum di input					

Gambar 12. IKK Keluaran

Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Gorontalo mengukur hasil atau produk yang dihasilkan sebagai bagian dari kegiatan atau program tertentu. IKK keluaran membantu mengukur sejauh mana kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Berikut adalah beberapa contoh potensial IKK keluaran yang dapat digunakan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Gorontalo:

- a. Pembangunan Infrastruktur
- b. Peningkatan Akses Pendidikan
- c. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
- d. Pengembangan Program Kesehatan
- e. Pengelolaan Lingkungan
- f. Perizinan Usaha dan Investasi
- g. Pengembangan Teknologi Informasi
- h. Pelaksanaan Program Sosial

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diperoleh kesimpulan bahwa sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah OPD dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK), kemudian untuk mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja, secara online oleh seluruh OPD Kota Gorontalo. Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo memiliki kelebihan seperti disiplin waktu input Elemen Data (ED) dan Data Pendukung (aplikasi memiliki limit waktu). Aplikasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menciptakan sistem yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Pemerintah Pusat, 2014.
- [2] P. Pusat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Jakarta: Pemerintah Pusat , 2020.
- [3] M. Nasution, "Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Budget*, vol. 4, no. 1, pp. 121-143, 2019.
- [4] M. M. A. T. D. Elip Helden, "Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro," *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, vol. 6, no. 3, pp. 7-13, 2020.
- [5] H. Al-Fatta, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- [6] A. K. O. S. M. S. P. Gede Ary Paramartha, "Perancangan User Interface dan User Experience Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Single Sign On," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer (JITTER)*, vol. 1, no. 2, pp. 1-12, 2020.
- [7] R. I. R. D. P. Aprivisi Ewa Abbas, "Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Information Architecture pada Website menggunakan Human-Centered Design (HCD) (Studi pada: Program Studi Pendidikan IPS ULM Banjarmasin)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 10, pp. 3512-3521, 2020.
- [8] Noerlina, "Evaluasi sistem informasi sumber daya manusia pada bidang usaha jasa," *Communication and Information Technology Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 99-101, 2008.
- [9] S. Nugroho, Gambaran Umum Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- [10] T. B. Kurniawan, "Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Makanan Dan Minuman Pada Cafeteria No Caffe Di Tanjung Balai Karimun Menggunakan Bahasa Pemrograman Php Dan Mysql," *Jurnal TIKAR*, vol. 1, no. 2, pp. 1-15, 2020.